



---

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA BADAN USAHA MILIK DESA STATUS BERKEMBANG DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PEREKONOMIAN DESA (STUDI KASUS PADA BUMDES TEMBELING DAN BUMDES BINTAN BUYU, KECAMATAN TELUK BINTAN, KABUPATEN BINTAN)**

Oleh

Hani Sulistyowati<sup>1</sup>, Salihi<sup>2</sup>, Muhammad Isa Alamsyahbana<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Akuntansi. STIE Pembangunan Tanjungpinang. Email:

Email: [1Hanisulistyowati1312@gmail.com](mailto:1Hanisulistyowati1312@gmail.com), [2salhipro@gmail.com](mailto:2salhipro@gmail.com),

[3albanadosenmuda@gmail.com](mailto:3albanadosenmuda@gmail.com)

**Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pembentukan, pengelolaan, dan aspek operasional BUMDes, serta kontribusi dan dampak ekonomi langsung maupun tidak langsung dari BUMDes Tembeling dan BUMDes Bintan Buyu terhadap peningkatan usaha ekonomi desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Informan penelitian ini terdapat 4 kelompok, yakni kelompok pertama Kepala Desa, kelompok kedua Ketua BUMDes serta pengelola unit masing-masing BUMDes, kelompok ketiga salah satu masyarakat sekitar BUMDes Tembeling dan BUMDes Bintan Buyu, dan kelompok keempat pihak Dinas PMD. Teknik yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan dari 7 indikator pada Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), BUMDes Tembeling dan BUMDes Bintan Buyu belum sepenuhnya sesuai dan belum dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian desa.

**Kata Kunci : BUMDes, Pengelolaan Dana, Kontribusi Terhadap Perekonomian Desa**

**Abstract**

*The purpose of this study is to analyze the formation, management, and operational aspects of BUMDes, as well as the direct and indirect economic contributions and impacts of BUMDes Tembeling and BUMDes Bintan Buyu on improving village economic efforts. The method used in this research is a qualitative method. There are 4 groups of informants for this research, namely the first group is the Village Head, the second group is the Head of BUMDes and the unit managers of each BUMDes, the third group is one of the communities around BUMDes Tembeling and BUMDes Bintan Buyu, and the fourth group is the PMD Service. The techniques used are data reduction, data presentation and conclusion drawing. The research results show that based on the 7 indicators in Bintan Regency Regional Regulation Number 9 of 2007 concerning the Formation and Management of Village-Owned Enterprises (BUMDes), Tembeling BUMDes and Bintan Buyu BUMDes are not fully compliant and have not been able to contribute to the village economy.*

**Keywords: Bumdes, Fund Management, Contribution To Village Economy**



## PENDAHULUAN

Desa adalah bagian terkecil dari sistem pemerintahan negara yang paling dekat. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 desa adalah komunitas hukum yang memiliki batas wilayah dan kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan, kepentingan lokal, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam kerangka pemerintahan NKRI. Desa memiliki peranan penting dalam sistem pemerintahan karena desa adalah entitas paling rendah dalam struktur pemerintahan. (Muhamad et al, 2022).

Pembangunan desa merupakan salah satu fokus utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Desa memiliki potensi besar yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu instrumen yang digunakan untuk mendorong pembangunan ekonomi desa adalah melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes diharapkan mampu mengelola potensi desa secara professional dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan, yaitu dengan membentuk suatu badan usaha yaitu Badan Usaha Milik Desa yang sesuai dengan permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang badan usaha milik desa, yang menyebutkan bahwa: "keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat

melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa". Pemerintah desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dan potensi yang efektif (Nurhayati, 2022).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa, khususnya BAB VIII tentang BUMDes bahwa berdirinya BUMDes mencerminkan pelaksanaan Ekonomi Produktif Desa melalui pendekatan kerjasama, yaitu :

- Memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar.
- Mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Desa yang masih belum dimanfaatkan secara maksimal.
- Memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan untuk mengelola badan usaha sebagai salah satu aset yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- Menyediakan unit-unit yang merupakan kegiatan ekonomi dari anggota masyarakat.

Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah untuk dapat meningkatkan perekonomian desa adalah dengan meningkatkan perekonomian desa dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pendirian BUMDes ini kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa



pemerintah desa dianjurkan untuk memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bertujuan untuk mengelola usaha yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi desa. Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu lembaga yang di dalamnya terdapat interaksi ekonomi antara pemerintah desa dengan masyarakat desa, sehingga hal ini juga berdampak pada hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat yang akan tercipta secara alamiah (Engkus *et al.*, 2021).

BUMDes Tembeling dan BUMDes Bintang Buyu merupakan BUMDes yang sudah berbadan hukum dan memiliki status BUMDes berkembang di Kecamatan Teluk Bintang. Salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan yaitu dengan terbentuknya badan usaha, dimana badan usaha ini berfungsi untuk memberdayakan masyarakat yang masih belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan dan meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Tembeling dan Desa Bintang Buyu.

Namun efektivitas pengelolaan dana BUMDes dalam mendukung pembangunan ekonomi desa masih menjadi pertanyaan penting yang memerlukan penelitian lebih mendalam. Terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dana BUMDes, termasuk masalah transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tembeling dan Desa Bintang Buyu sangat relevan untuk memahami bagaimana BUMDes dapat memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian desa.

Penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis pengelolaan dana BUMDes Tembeling dan BUMDes Bintang Buyu serta melihat apa saja kontribusinya terhadap perekonomian desa. Dalam konteks ini, pengelolaan dana mencakup pembentukan, jenis usaha, organisasi dan badan kepengurusan, permodalan, bagi hasil usaha, kerjasama antar desa dan pihak lain, dan pembinaan yang dilakukan oleh BUMDes dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kontribusi terhadap perekonomian desa dilihat dari dampak langsung dan tidak langsung yang belum dirasakan oleh masyarakat, termasuk peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan kapasitas lokal.

Implementasi Badan Usaha Milik Desa di sejumlah daerah masih belum bisa dikatakan efektif dalam memberikan kontribusi secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat desa karena pola pemanfaatan dana Badan Usaha Milik Desa masih belum berjalan maksimal. Hal ini bisa dilihat dari usaha BUMDes yang dijalankan di desa tersebut yang hanya bisa mengakomodir sebagian masyarakat saja

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dan menggunakan metode deskriptif sebagai pendekatan. Penelitian ini bertujuan untuk membuat kesimpulan dengan menggambarkan dan menguraikan data penelitian dan keadaan pada BUMDes Tembeling dan BUMDes Bintang Buyu di Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintan. Peneliti hanya melihat apa yang terjadi pada objek atau area penelitian tanpa menambah-nambahkan atau mengubahnya. Memaparkan hasilnya dalam bentuk kata-kata daripada angka



dan lebih mengutamakan proses daripada hasil (Sugiyono, 2019).

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2019). Dalam uji keabsahan data ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara yang dilakukan langsung pada saat penelitian sedangkan data sekunder diperoleh berdasarkan dokumen-dokumen resmi yang dimiliki BUMDes Tembeling dan BUMDes Bintang Buyu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pengelolaan Dana BUMDes dan Kontribusinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 9 Tahun 2007**

Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk memberikan dukungan kepada masyarakat kecil, terutama di daerah pedesaan karena wilayah pedesaan dianggap sebagai elemen krusial dalam upaya pemerintah untuk mendorong ekonomi dan memberdayakan masyarakat berbasis kerakyatan. Guna mencapai kesejahteraan masyarakat, pemerintah telah merumuskan kebijakan seperti lembaga ekonomi. Salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa adalah usaha yang dimiliki, dikembangkan, dan dijalankan oleh masyarakat desa. Mereka membantu desa menggunakan potensinya dan memenuhi kebutuhan desa sehingga desa saling menguntungkan.

Dapat dilihat dari tabel hasil

wawancara yang disesuaikan dari komponen Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), terbentuklah 7 indikator yang menurut peneliti cocok untuk digunakan dalam penelitian ini yaitu pembentukan, jenis usaha, organisasi dan badan kepengurusan, permodalan, bagi hasil usaha, kerjasama antar desa dan pihak lain, dan pembinaan.

Dalam penerapannya pada setiap badan usaha tentu saja berbeda-beda, ada yang sudah maksimal ada juga yang belum. Namun hal tersebut dapat diatasi agar kedepannya menjadi lebih baik lagi.

- a. Pembentukan, pada dasarnya sangat diperlukan. Melalui musyawarah bersama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masing-masing BUMDes Tembeling dan BUMDes Bintang Buyu dibentuk atas dasar regulasi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan desa.
- b. Jenis usaha, BUMDes Tembeling dan BUMDes Bintang Buyu menentukan jenis usaha yang sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat. Karena mayoritas penduduk Desa Tembeling bekerja sebagai petani, BUMDes membuat usaha penyewaan pick up untuk membantu mengangkut pupuk, hasil pertanian, dan lainnya. Sedangkan pada Desa Bintang Buyu memiliki potensi alam yang baik, maka BUMDes Bintang Buyu membuat usaha depot air galon isi ulang yang airnya langsung dari sumber. Selain itu BUMDes Bintang Buyu juga memiliki jenis usaha lain yaitu sewa menyewa tenda.



- c. Organisasi dan Badan Kepengurusan, adalah struktur atau entitas yang dibentuk untuk mengelola Badan Usaha Milik Desa. Organisasi ini terdiri dari berbagai komponen, tugas, dan tanggungjawabnya. Pada BUMDes Tembeling dan BUMDes Bintang Buyu sudah ditetapkan pengurus serta tanggungjawabnya masing-masing yang bekerja sama untuk mencapai tujuan BUMDes.
- d. Permodalan, pada BUMDes Tembeling dan BUMDes Bintang Buyu permodalan berfungsi sebagai landasan untuk menjalankan berbagai kegiatan ekonomi dan pengembangan tingkat desa. Modal dapat berasal dari bantuan pemerintah, pada BUMDes Tembeling dan BUMDes Bintang Buyu permodalan berasal dari penyertaan dana yang diberikan oleh desa, yang diharapkan dapat digunakan untuk kebutuhan BUMDes.
- e. Bagi hasil usaha, pada indikator ini mengacu pada pembagian hasil ataupun keuntungan yang diperoleh dari berbagai jenis usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pada BUMDes Tembeling dan BUMDes Bintang Buyu sudah membagi hasil terhadap desa dengan presentase sebesar 30% dari penghasilan, 20% cadangan modal, 40% untuk pengurus, dan 5% dana administrasi. Pada BUMDes Tembeling 5% sisanya digunakan untuk dana sosial, sedangkan pada BUMDes Bintang Buyu 2% dana sosial dan 3% dana pendidikan.
- f. Kerjasama antar desa dan pihak lain, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat dilakukan dengan kerjasama antar desa atau pihak lain untuk meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan BUMDes. Pada BUMDes Tembeling dan BUMDes Bintang Buyu belum melakukan kerjasama dengan desa lain.
- g. Pembinaan, untuk mendukung, membantu, dan membimbing Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah, lembaga pembangunan, atau organisasi masyarakat melakukan berbagai upaya dan kegiatan yang dikenal sebagai pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa dibentuk untuk meningkatkan kapasitas, kinerja, dan keberlanjutan mereka sehingga mereka dapat berperan dalam pengembangan ekonomi dan sosial di tingkat desa. Pada BUMDes Tembeling dan BUMDes Bintang Buyu belum mendapatkan pembinaan yang cukup baik dari desa, pembinaan yang dilakukan lebih sering dari dinas, namun evaluasi terhadap efektivitas pembinaan yang diberikan masih kurang baik dikarenakan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masih banyak yang belum memahami terhadap pembinaan yang diberikan sehingga terlihat tidak maksimal dengan pembinaan yang sudah diberikan.
- Maka dapat disimpulkan berdasarkan dari indikator-indikator pada Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), BUMDes Tembeling dan BUMDes Bintang Buyu belum sepenuhnya sesuai dan belum dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian desa.



## **Pengelolaan Dana BUMDes dan Kontribusinya terhadap Perekonomian Desa di BUMDes Tembeling dan BUMDes Bintang Buyu**

BUMDes Tembeling dan BUMDes Bintang Buyu tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tetapi juga memberikan kontribusi terhadap perekonomian desa. Sebagai hasil wawancara peneliti dengan narasumber di Desa Tembeling dan Desa Bintang Buyu, ternyata BUMDes Tembeling dan BUMDes Bintang Buyu belum melakukan pengelolaan dana yang baik dan belum memberikan kontribusi terhadap perekonomian desa, hal ini juga tidak sesuai dengan status BUMDes Berkembang pada BUMDes Tembeling dan BUMDes Bintang Buyu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghasilan yang di dapatkan pada BUMDes Tembeling dengan jenis usaha sewa pick up mengalami penurunan dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa belum terlihatnya kontribusi terhadap desa karena masih menyumbangkan penghasilan ke desa dan sosial dengan nominal yang sangat kecil. Selain itu, manfaat yang diberikan secara langsung hanya sebatas dapat membantu warga sekitar. Sedangkan manfaat tidak langsungnya belum terlihat. Hal ini dapat dikatakan bahwa BUMDes belum mampu mengelola dana yang diberikan semaksimal mungkin karena belum terlihat kontribusi apapun.

Hasil penelitian pada BUMDes Bintang Buyu menunjukkan bahwa penghasilan yang di dapatkan dari tahun 2022 hingga tahun 2024 tidak menentu. Pada tahun 2022 BUMDes Bintang Buyu menghasilkan pendapatan sebesar Rp4.465.000.- hanya dari jenis usaha depot galon isi ulang. Terlihat

bahwa pada tahun 2022 BUMDes Bintang Buyu hanya mampu menjalankan 1 jenis usaha. Sedangkan pada tahun 2023 mengalami kenaikan penghasilan yang signifikan dengan 2 jenis usaha yaitu depot air galon isi ulang dan sewa menyewa tenda dengan jumlah penghasilan Rp13.030.000.-. Pada tahun 2024 BUMDes Bintang Buyu mengalami penurunan penghasilan yang cukup drastis dengan jumlah penghasilan Rp7.000.000.- karena hanya menjalankan 1 jenis usaha yaitu sewa menyewa tenda. Dampak langsung yang diberikan hanya sekedar membantu warga sekitar dan dampak tidak langsung yang diberikan belum ada. Hal ini dapat dikatakan bahwa BUMDes Bintang Buyu juga belum mampu mengelola dana yang diberikan secara maksimal karena belum terlihat kontribusi terhadap perekonomian desa.

Dari uraian-uraian diatas dapat diketahui bahwa Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa Status Berkembang dan Kontribusinya Terhadap Perekonomian Desa belum dirasa cukup maksimal, hal ini dapat dibuktikan dari uraian kontribusi BUMDes Tembeling dari tahun 2022 hingga tahun 2024 mengalami penurunan dan uraian kontribusi BUMDes Bintang Buyu dari tahun 2022 hingga tahun 2024 mengalami ketidakkonsistenan. Hal ini juga terlihat bahwa BUMDes Tembeling dan BUMDes Bintang Buyu seharusnya belum bisa dikatakan BUMDes dengan status berkembang.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil analisis data mengenai pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan kontribusinya terhadap perekonomian



desa, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Melalui musyawarah bersama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masing-masing BUMDes Tembeling dan BUMDes Bintang Buyu dibentuk atas dasar regulasi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan desa.
2. BUMDes Tembeling dan BUMDes Bintang Buyu menentukan jenis usaha yang sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat.
3. BUMDes Tembeling dan BUMDes Bintang Buyu sudah ditetapkan pengurus serta tanggungjawabnya masing-masing yang bekerja sama untuk mencapai tujuan BUMDes.
4. Pada BUMDes Tembeling dan BUMDes Bintang Buyu permodalan berasal dari penyertaan dana yang diberikan oleh desa, yang diharapkan dapat digunakan untuk kebutuhan BUMDes.
5. Pada BUMDes Tembeling dan BUMDes Bintang Buyu sudah membagi hasil terhadap desa dengan presentase sebesar 30% dari penghasilan, 20% cadangan modal, 40% untuk pengurus, dan 5% dana administrasi. Pada BUMDes Tembeling 5% sisanya digunakan untuk dana sosial, sedangkan pada BUMDes Bintang Buyu 2% dana sosial dan 3% dana pendidikan.
6. BUMDes Tembeling dan BUMDes Bintang Buyu belum melakukan kerjasama dengan desa lain.
7. BUMDes Tembeling dan BUMDes Bintang Buyu belum mendapatkan pembinaan yang cukup baik dari desa, pembinaan yang dilakukan lebih sering dari dinas namun evaluasi terhadap efektivitas pembinaan yang diberikan masih

kurang baik dikarenakan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masih banyak yang belum memahami terhadap pembinaan yang diberikan.

8. Kontribusi terhadap perekonomian desa belum begitu terlihat karena penghasilan dari jenis usaha yang dijalankan oleh kedua BUMDes masih tergolong sangat kecil jumlahnya. Dampak langsung lebih dominan terhadap ketersediaan layanan usaha, sementara dampak tidak langsung masih belum terlihat. Apabila BUMDes mengalami penurunan status pemeringkatan, maka pihak Dinas PMD akan mengeluarkan surat teguran dan dilakukan pemantauan berkala serta modal yang akan diberikan kepada BUMDes akan diperkecil nilainya.

#### Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi instansi terkait
  - a. Pastikan alokasi dana desa untuk BUMDes diarahkan pada usaha yang memiliki dampak ekonomi maksimal bagi masyarakat.
  - b. Berikan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes terutama dalam bidang manajemen dan kewirausahaan.
  - c. Meningkatkan kualitas masing-masing BUMDes agar sesuai dengan penskalaan (*scaling*) BUMDes Berkembang.
  - d. Dorong kolaborasi atau kerjasama antar BUMDes



dengan lembaga keuangan atau sektor swasta untuk mendukung pengembangan usaha.

2. Bagi penulis selanjutnya lakukan penelitian lanjutan dengan metode kuantitatif untuk mengukur pengelolaan dana dan dampak ekonominya terhadap BUMDes secara terperinci.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andriana, Sudarno, Utami, A. N., Susanto, A. B., & Kurniaty. (2021). Disclosing the Village-Owned Enterprises (BUMDes) Financial Management Accountability. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/921/1/012001>
- Arindhawati, A. T., & Utami, E. R. (2020). Dampak Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ponggok, Tlogo, Ceper dan Manjungan Kabupaten Klaten). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 43–55. <https://doi.org/10.18196/rab.040152>
- Ariyulianti, A., & Gunawan, A. (2023). Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan Perekonomian Masyarakat Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barta. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(2), 263–273. <https://doi.org/10.22225/kr.14.2.2023.263-273>
- Biduri, S. (2018). *Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik* (B. S. Sartika (Ed.)). UMSIDA PRESS.
- Cahyani, E., Guspul, A., & Wijayanti, R. (2019). Analisis Pengaruh BUMDes Dalam Menopang Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo (Studi Empiris Pada BUMDes Silatri Indah Desa Beran dan BUMDes Srikandi Desa Ropoh). *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1(1), 32–39.
- Delia, K., & Esabella, S. (2023). Pengembangan Sistem Informasi Kredit Sahabat Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Moyo Berbasis Android. *Management of Information System Journal*, 1(3), 120–125. <https://journal.fkpt.org/index.php/mis>
- Diniasari, G. M., & Dahtiah, N. (2023). Peranan BUMDes Guha Bau Dalam Memanfaatkan Dana Desa Untuk Pengembangan Desa Wisata Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(2), 309–318. <https://doi.org/10.22225/kr.14.2.2023.309-318>
- Dunakhir, S., & Bus, M. (2022). *Pengelolaan Dana Desa di Sulawesi Selatan* (T. Ekonomi Syariah: Studi Kasus BUMDes Ratu Kemuning Desa Cimanggis Bojonggede Bogor. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(1), 22–37. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i1.619>
- Hafif, N., & Daryanto, D. (2023). Peran BUMDes Terhadap Pendapatan Petani Di Desa Karangsono Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro The. *Agri-SosioEkonomi Unsrat*, 5(3), 1451–1460.
- Hasibuan, S. A., Silalahi, P. R., & Tambunan, K. (2022). Peranan



- Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pada Kesejahteraan. *Ilmu Komputer, Ekonomo Dana Manajemen*, 2(1), 64–71.
- Hestiana, A., Faridah, & Romdana. (2024). Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Desa Gelombang Kecamatan Semidang Alas Maras (SAM) Kabupatn Seluma. *Journal of Governance and Public Administration (JoGaPA)*, 1(2), 133–149.
- Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Pub. L. No. Nomor 145 Tahun 2022 (2022).
- Nurjanah, Y., & Hertati, D. (n.d.). *Tranparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Cangkringrandu Kecamatan Perak Kabupaten Jombang*. 22–38.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014. (2014).
- Putri, R., & Munari. (2023). Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. *ETNIK: Jurnal Ekonomi - Teknik*, 2(6), 552–535.
- Putri, T. S., & Niswah, F. (2021). Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa) di Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung. *Publika*, 9(4), 367–376.
- Rahayu, R., Suryani, I. P., Karib, A., & Sari, V. G. (2022). Financial Literacy of Village-Owned Enterprises (BUMDes) Managers: A study of BUMNag Managers in West Sumatra Province. *Jurnal Kajian Manajemen Bisnis*, 11(1), 29–43.
- <https://doi.org/10.24036/jkmb.11650500>
- Ramadana, C. B., Ribawanto, H., & Suwondo. (n.d.). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(6), 1068–1076.
- Rofidah, N. (2019). *Analisis Pengelolaan Keuangan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gondongwangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang*.
- Sinarwati, N. K., & Prayudi, M. A. (2021). Kinerja Badan Usaha Milik Desa dan Kontribusinya Bagi Pendapatan Asli Desa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 10(3), 505–518.  
<https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v10i3.37931>
- Susanti, E., & Lestari, A. (2020). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Aeeropa di Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 5(3), 34–39.
- Wibowo, M. I. S., & Hapsari, A. N. S. (2022). Pengelolaan Keuangan BUMDes: Upaya Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 9(01), 52–71.  
<https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.01.05>
- Zamzami, F., Wulandari, R., Natasari, D., & Huda, I. (2022). *Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Sesuai PP NO.11 Tahun 2021* (F. Zamzami, R. Wulandari, D. Natasari, & I. Huda (Eds.)). Gadjah Mada University Press Anggota IKAPI dan APPTI.



---

Zuhri, M. A., & Muljaningsih, S. (2022).  
Analisa Pengelolaan Alokasi  
Anggaran Dana Desa Beserta  
Faktor Penghambat dan  
Pendukung Pada Badan Usaha

Milik Desa (Studi Kasus Desa  
Babaksari, Kecamatan Dukun,  
Kabupaten Gresik). *Jurnal  
Governansi*, 8(2), 131-140.